

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321.
- Afifah & Fitria (2022), *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pelayanan publik Samsat Sidoarjo*, STIEI Surabaya, e-ISSN: 2460-0585.
- Agun, Winny, dkk. (2022), *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*, ISSN: 2597-7555, Vol. 6 No. 1: Hal. 23-31, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Warmadewa
- Ananda, dkk. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol 6 No 2. Hal 1.
- Andayani, S. F. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP PRATAMA Majalaya. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (2), 162-169.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arrozi, A., & Rahayu, S. (2021). *Pengaruh Penaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Tahun 2021 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan Di Kabupaten Bogor Jawa Barat)*. Comparative: Ekonomi dan Bisnis, 3(1), 93–109.
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 23-37.
- Astuti, R. Y., & Kurniawan, D. A. (2019, August). Analisis ekonomi Islam meninjau praktek transparansi top up (penambahan pinjaman) perbankan. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 212-220).
- Basri, Y.M, Surya, R.A.S, Fitriarsi, R, Novryan, R, Tania, T.S. (2014). *Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/088-PPJK-19.
- Bungin, Burhan dan Mashudi. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Ketiga. Jakarta.
- Cahyadi, I Made Wahyu dan I Ketut Jati. (2016). *Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.3.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris

- pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745-757.
- Fahri, M. (2020). Analisis Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 3(1), 14-29.
- Fazri, Muhammad, (2021), *Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Menggunakan E-Samsat Di Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Samarinda*, eJournal Administrasi Publik, 2021, 9 (1): 4868-4880 ISSN 2541-674x, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id
- Ghozali, Imam, (2021)., *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26, Edisi 10*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Haikal, Fikri Muhammad & Deasy Mauliana (2022) Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar) *Jurnal Administrasi Negara* Volume 28 Nomor 1, Edisi April 2022 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon*, 2016, 279-283.
- Indradi, S. S. (2017). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Intrans Publishing. Malang.
- Irfansyah, A., Romanda, C., & Asoka, R. (2023). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(2), 236-254.
- Jaeng, T. Y., & Yadnyana, I. K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Studi Kasus Di Kabupaten Sikka, NTT):(Studi Kasus Di Kabupaten Sikka). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 509-521.
- Jannah, I.N. (2017). *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Jayate, R.P.S.E. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–17.

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Mahmudi, (2019), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Keempat, Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik, Yogyakarta, STIM YKPN
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [*canarium indicum l.*]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333-342.
- Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK no. 45 (AKMEN Jurnal Ilmiah, 45(45), 170–188.
- Marlinda, dkk. (2024), *Transparansi informasi publik di Kota Pekanbaru oleh Pejabat Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru*, Univ. Riau, Vol. 16 No. 3 januari 2024, Hal. 536-541.
- Nafisa, A. C., Mahendra, B. I., Khoirunnisa, D., Wardana, M. A., Putri, S. A., Irawati, I., & Fajri, M. (2024). Analisis Pelaksanaan Prinsip Transparansi APBNag Cubadak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2022. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 14(1), 39-46.
- Oktarina, Frisika, dkk. (2023), *Transparansi, pengawasan, akuntabilitas, redesain sistem penganggaran dan kinerja badan layanan umum*, Univ. Negeri Sriwijaya Palembang Indonesia, e-ISSN: 2548-9224, p-ISSN: 2548-7507, Vol. 7 No. 4 Oktober 2023
- Pakpahan, Yunita (2015), *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, JOM. FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59-73.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Katalogis*, 5(3).
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17-35.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 45-56.
- Sasongko, H. Ajun. (2008). *Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Provinsi*

- Banten. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Tangerang Banten.
- Setyowati, E. D., Wulandari, P., Yantino, A., & Narastri, M. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jea17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 17-28.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2018), *Method Research Kuantitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sulistiyawati, N. L. P. I. (2020). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. *Journal of Applied Management Studies*, 2(1), 27-37.
- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 150-161.
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44-56.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169–179.
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 11(1), 183-197.
- Wiratama Yumico Patricia, Hari Hananto (2019) *Pengaruh Persepsi Transparansi Aliran Dana Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kpp Pratama Sawahan Surabaya*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.2 (2019)
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96-102.
- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2*. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253.
- Yunita Eriyanti Pakpahan (2015), *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan OM*. FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang. Pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan